

Jurnal Fatihin

by Choirul Fatihin

Submission date: 26-Jan-2023 03:04PM (UTC+0700)

Submission ID: 1999726158

File name: Jurnal_FIX.docx (234.91K)

Word count: 5409

Character count: 36726

Urban Farming: Implementasi Kebijakan Pemerintah pada Program Ketahanan Pangan dan Kualitas Hidup Masyarakat

Abstract

The implementation of the urban farming program is a form of the Sidoarjo regency government's efforts to support food security and improve the quality of life of people in densely populated areas and on the other hand Sidoarjo has experienced a conversion of agricultural land to housing and factories. This program aims to enable people to meet their food needs independently and improve the economy and motivate them to form farmer groups to build themselves to be more independent and develop. The background of this study is based on the results of the researcher's initial observations looking at the problem of agricultural land conversion due to the high population surge and infrastructure development in Sidoarjo Regency which interferes with food conditions and the quality of life of the community. Therefore, this study wants to know how the implementation of the urban farming program in supporting food security and improving the quality of life of the people in Sidoarjo regency. In this study, researchers used qualitative methods with a descriptive approach. Data collection is carried out with interview techniques, observation, and documentation. drawing conclusions related to the reality in the field regarding the implementation process of the urban farming program in Taman Pinang Housing, Lemahputro Village, Sidoarjo Regency.

Keywords: Administration, Collaborative, Policy, Program, Quality

PENDAHULUAN

Kebutuhan pangan merupakan hal yang mendasar bagi keberadaan dan kedaulatan suatu negara untuk keberlangsungan hidup masyarakat (Erna, 2018). Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat khususnya bidang pangan dari sektor pertanian. Proses mewujudkannya terdapat sedikit banyak masalah mulai dari aspek lingkungan maupun aspek yang lainnya (Candrawati *et al.*, 2019). Pembangunan merupakan salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar terhadap jumlah populasi yang kian meningkat di daerah perkotaan sehingga akan berdampak terjadinya konversi lahan, serta adanya penurunan kualitas lingkungan disekitar kota. Tentunya hal ini harus menjadi salah satu acuan bagi pemerintah dan masyarakat daerah perkotaan untuk dapat mencari cara lain agar bisa memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri sehingga tidak lagi menggantungkan pada pertanian dari desa (Adiyono and Novianto, 2022).

Undang Undang No 18 Tahun 2012 menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi dimana terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan dengan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Ketahanan pangan dapat terwujud apabila telah memenuhi dua aspek yaitu tersedianya pangan yang cukup serta merata untuk seluruh penduduk dan setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari (Lasminingrat and Efriza, 2020). Ketahanan pangan pada tingkat rumah merupakan dasar dari ketahanan pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi tiang bagi ketahanan pangan daerah dan nasional. Fokus utama dari pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat agar mereka mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri dan mampu mewujudkan ketahanan pangan rumah tangganya secara berkelanjutan (Simanjuntak and Erwinsyah, 2020). Optimalisasi sumber daya aset disetiap

3 rumah tangga menjadi salah satu solusi dalam mendukung program pemerintah pada ketahanan pangan secara mandiri disetiap keluarga. Pemanfaatan pekarangan rumah adalah salah satu jawaban pertahanan pangan mandiri skala rumah tangga.

Pemanfaatan pekarangan rumah sebagai ketahanan pangan mandiri tidak membutuhkan lahan yang luas, lahan sempit didaerah perkotaan pun dapat membangun ketahanan pangan tersebut. Pendekatan yang digunakan pada masyarakat perkotaan dalam hal menanam yaitu melalui *urban farming*. Pertanian perkotaan (*urban farming*) merupakan salah satu upaya pemanfaatan ruang terbatas yang ada diperkotaan agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri (Austin, 2021). Urban farming konsep pertanian perkotaan yang kegiatan pertumbuhan, pengelolaan serta distribusi pangan melalui budidaya tanaman dan perternakan yang dilakukan intensif di perkotaan (Ilvira Ginting, 2019)

Inovasi teknologi budidaya pertanian yang dilakukan dengan konsep *urban farming* umumnya memaksimalkan lahan pekarangan yang tersedia, Urban farming merupakan salah satu gerakan yang dimulai di negara Amerika Serikat sebagai solusi terhadap terpuruknya situasi dan kondisi perekonomian beberapa negara saat perang dunia terutama terhadap tingginya harga sayur pada kala itu (Belinda *et al.*, 2017), salah satu metode yang digunakan yaitu hidroponik. Metode hidroponik tidak memakai campuran tanah dan kompos sebagai media tanam, tetapi menggunakan larutan nutrisi sebagai sumber makanan tanaman. Komposisi larutan sebagai media tanam sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dari segi jumlah helai daun, luas daun, dan berat tanaman. Pada umumnya jenis sayuran yang ditanam melalui berbagai konsep budidaya tanpa tanah ini memiliki waktu panen singkat, diharapkan setiap bulan panen dan dapat menjaga ketahanan pangan mandiri serta dapat membantu menopang ekonomi masyarakat (Ahmad and Setyowati, 2021).

Sebagai salah satu daerah penyangga bidang pangan ibukota provinsi, kabupaten sidoarjo merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Perkembangan pesat tersebut dengan melalui berbagai potensi diwilayahnya, seperti industri, perdagangan, dan perumahan (real estate), serta usaha kecil menengah yang dikemas dengan baik dan terarah. Massifnya pembangunan pada bagian industri, perdagangan, dan perumahan tersebut, memiliki *impact* negatif bagi sektor pertanian, yakni pada penyempitan lahan pertanian, sempitnya lahan pertanian berdampak pada menurunnya produksi pangan pokok, sedangkan permintaan terkait hasil pertanian seperti halnya padi yang terus meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk. Maka, masalah yang akan terjadi ketika kurangnya pasokan pangan adalah terjadinya defisit pangan yang dialami oleh masyarakat, bahkan dapat menyebabkan terjadinya inflasi harga pangan ketika permintaan (demand) lebih tinggi dari pasokan (supply).

2 Dalam rangka menanggulangi permasalahan sosial serta sekaligus meningkatkan fungsi ketahanan pangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pangan dan Pertanian menyusun program *urban farming* berdasarkan Undang-Undang No. 18/2012 tentang pangan dan yang kedua ialah Peraturan Pemerintah No. 17/2015 tentang CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Daerah) melalui dasar hukum tersebut pemerintah Kab. Sidoarjo melalui Dinas Pangan dan Pertanian melakukan implementasi konsep program *urban farming* yang diharapkan dapat mewujudkan pembangunan pangan secara berkelanjutan di Kab. Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan dinas terkait memiliki kewajiban berdasarkan tugas dan fungsinya, yakni mengupayakan pemanfaatan dan memaksimalkan fungsi ekologis yakni salah satunya berupa adanya ruang terbuka hijau sebagai upaya prioritas ketahanan pangan masyarakat secara mandiri.

Data dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo menunjukkan luas lahan pertanian pada tahun 2019 hingga 2021 terhitung sudah banyak lahan yang mengalami penyusutan. Hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Luas Lahan Pertanian Kabupaten Sidoarjo (Tahun 2019 – 2021)

DATA LUAS LAHAN PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO										
TAHUN 2019-2021										
No	Kecamatan	Luas Lahan Sawah Tahun 2019			Luas Lahan Sawah Tahun 2020			Luas Lahan Sawah Tahun 2021		
		Tebah	Setengah Tebahi	Jumlah	Tebah	Setengah Tebahi	Jumlah	Tebah	Setengah Tebahi	Jumlah
1	2	15	17	15	17	15	17	15	17	
1	Sidoarjo	310	-	310	405	-	405	405	-	405
2	Bodrebo	527	-	527	551	-	551	521	-	521
3	Candi	1.044	-	1.044	1.020	-	1.020	790	-	790
4	Penang	751	-	751	771	-	771	771	-	771
5	Kramat	1.812	-	1.812	1.812	-	1.812	1.812	-	1.812
6	Tanjungsari	1.893	-	1.893	1.893	-	1.893	1.893	-	1.893
7	Tanggulangit	1.298	-	1.298	1.297	-	1.297	1.128	-	1.128
8	Lahayu	1.993	-	1.993	1.993	-	1.993	1.919	-	1.919
9	Kramat	1.135	-	1.135	1.135	-	1.135	1.130	-	1.130
10	Bojonegara	1.614	-	1.614	1.614	-	1.614	1.706	-	1.706
11	Wongorejo	2.012	-	2.012	2.012	-	2.012	1.977	-	1.977
12	Tanj	2.091	-	2.091	2.091	-	2.091	2.094	-	2.094
13	Prambors	1.992	-	1.992	1.994	-	1.994	1.992	-	1.992
14	Taman	481	-	481	477	-	477	376	-	376
15	Waru	45	-	45	45	-	45	45	-	45
16	Gejangan	422	-	422	422	-	422	406	-	406
17	Jedidi	310	-	310	310	-	310	479	-	479
18	Dukuhrejo	1.475	-	1.475	1.516	-	1.516	1.501	-	1.501
Jumlah		20.878	-	20.878	20.882	-	20.882	20.498	-	20.498

Sumber: Dinas Pangan dan pertanian Kab Sidoarjo 2022

Berdasarkan pemaparan tabel diatas luas lahan pertanian Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019-2021 di beberapa kecamatan mengalami penurunan secara drastis. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh alih fungsi lahan pertanian akibat dari dampak pembangunan secara berkelanjutan. Masalah seperti ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar masalah tersebut tidak menimbulkan masalah baru dan saling tumpang tindih.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pangan dan Pertanian menekankan bahwa program *urban farming* merupakan salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan, kualitas hidup, dan ekonomi masyarakat, khususnya disektor pertanian. Dinas Pangan dan Pertanian selaku unsur penasehat dan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan, guna mendukung program pertanian, peternakan dan perkebunan di tingkat pusat maupun daerah untuk mendorong hadirnya program guna mengatasi isu-isu praktis seputar lingkungan, ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat saat ini.

Berdasarkan pernyataan dari Sugiarti selaku Kepala Bidang Kelompok Jabatan Fungsional mengemukakan bahwasannya ditahun 2022 ada tiga kecamatan yang sudah menjalankan program *urban farming*, masing masing dari kecamatan tersebut mengalami penyusutan lahan pertanian secara drastis. Dijelaskan tiga kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Candi, Kecamatan Sidoarjo, dan Kecamatan Waru. Perumahan Taman Pinang masuk dalam wilayah administrasi kelurahan lemahputro, kecamatan sidoarjo yang menjadi sasaran target implementasi program *urban farming*. Karena wilayah tersebut tidak memiliki lahan pertanian. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian di wilayah tersebut dengan mengambil judul “*Urban Farming: Implementasi Kebijakan Pemerintah pada Program Ketahanan Pangan dan Kualitas Hidup Masyarakat*”.

METODE

Dalam penelitian mengenai “*Urban Farming: Implementasi Kebijakan Pemerintah pada Program Ketahanan Pangan dan Kualitas Hidup Masyarakat*”, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini peneliti bertujuan untuk memahami fenomena, dan penelitian ini dipaparkan dengan cara deskriptif yang berorientasikan pada bahasa ataupun kata-kata, gambar, dan bukan angka (Sugiyono, 2016). Maka metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif sangat sesuai digunakan dalam penelitian ini. Keterangan yang didapatkan nantinya tidak berupa angka melainkan berupa deskripsi sehingga akan lebih mudah untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan, serta memaparkan data yang diperoleh berkaitan dengan proses implementasi program *urban farming* di Perumahan Taman Pinang Kelurahan Lemahputro Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini berfokus pada “*Urban Farming: Implementasi Kebijakan Pemerintah pada Program Ketahanan Pangan dan Kualitas Hidup Masyarakat*” yakni, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam program *urban farming* di perumahan taman pinang. Sumber data yang peneliti ambil ialah bersumber dari data primer yang langsung kami meminta data dari Kepala Dinas Pangan Dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, Kepala Bidang Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, dan Kelurahan lemahputro. Data sekunder yang berupa data dokumen sebagai pelengkap dari data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan data sekunder yaitu dengan melakukan; Observasi, Interview, Dokumentasi dalam rangka mendapatkan data akurat di lapangan (Sugiyono, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti telah melakukan kegiatan observasi dan juga wawancara, selanjutnya akan peneliti jelaskan tentang faktor faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam program *urban farming* di perumahan taman pinang di Kelurahan lemahputro .Kabupaten Sidoarjo.

Urban Farming merupakan solusi dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dan menciptakan alternatif baru yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan. Program *urban farming* pertama kali hadir di Indonesia pada akhir tahun 2011 yang merupakan respon pemerintah terhadap permasalahan pangan diperkotaan. *Urban farming* telah hadir di Sidoarjo sekitar tahun 2017 dengan nama P2L (Pekarangan Pangan Lestari) yang memiliki tujuan untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Sadali, 2018). Program ini berfokus pada sektor pertanian yang berada dibawah tanggung jawab Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan kewenangannya. Selain itu kutipan wawancara dari Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Eni Rustianingsih mengatakan

“Bahwa besarnya alih fungsi lahan dapat mengancam ketersediaan pangan masyarakat. Salah satu cara untuk menopang pangan melalui skala terkecil dahulu yaitu pemanfaatan pekarangan rumah melalui program *urban farming*, disamping itu kondisi pasar di Sidoarjo khususnya pada komoditas sayuran masih belum bisa terpenuhi. Untuk itu kita masih mengandalkan daerah dari luar Sidoarjo untuk memenuhi kebutuhan sayur disini. Diharapkan tujuan dari program ini selain untuk menopang ketahanan pangan masyarakat juga bisa memenuhi kebutuhan pasokan sayur secara mandiri sehingga tidak

terlalu mengandalkan sayur dari luar daerah Sidoarjo” Ujar Ibu Eni Rustianingsih (Hasil Wawancara, 13 April 2022 pukul 12.31 WIB).

Guna memperkuat bukti maka disajikanlah tabel daftar komoditas kebutuhan pangan masyarakat yang dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2.
Tabel PPH Konsumsi Kabupaten Sidoarjo (2022)

No	Kategori Pangan	Berd Konsumsi Pangan (kg/kapita/hari)	Perhitungan Skor Pula Pangan (PPH)					Gap Skor AKE dan Skor Maksimal	Skor PPH		
			Kalori	% AKE	Bobot	Skor AKE	Skor Bobot				
1	Padi/cabai	244,7	888,6	40,2	0,6	21,6	21,1	28,0	-3,9	21,1	
2	Jagung/ubi	91,2	101,0	6,0	4,8	0,6	3,4	2,4	2,0	-0,1	2,4
3	Pangan Hewan	282,9	383,7	18,7	18,2	2,0	37,0	36,5	24,0	-2,0	24,0
4	Sayur dan Lahan	35,0	213,3	18,3	14,9	0,6	7,6	7,0	6,0	2,0	6,0
5	Buah/Biji Ber Minyak	3,0	19,3	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,0	0,0
6	Pangan Kacangan	29,0	69,0	3,4	3,3	2,0	6,8	6,0	10,0	-3,4	6,8
7	Buah	23,7	67,1	4,3	4,1	0,6	2,1	2,1	2,0	-0,4	2,1
8	Sayur dan Buah	286,6	119,8	6,9	5,7	0,0	29,3	29,8	30,0	-1,4	29,8
9	Lahan	69,0	68,6	3,4	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total			2048,0	106,0	97,6	0,0	107,8	108,2	108,0		90,2

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingginya tingkat konsumsi sayur dan buah masyarakat sidoarjo namun dengan tidak diimbangnya pasokan yang cukup mengharuskan kabupaten sidoarjo untuk impor sayur dan buah dari kabupaten lain agar dapat memenuhi kebutuhannya. Supaya kebutuhan sayuran dapat terpenuhi dan mencapai ketahanan pangan secara mandiri maka muncullah program *Urban Farming*. Selain untuk meningkatkan ketahanan pangan, *urban farming* ini juga berfungsi untuk membantu perekonomian serta mencukupi kebutuhan pangan masyarakat khususnya tanaman jenis sayuran.

Pelaksanaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang dilakukan oleh Dinas Pangan Kab. Sidoarjo salah satunya dilaksanakan pada Kelurahan Lemahputro, wilayah ini merupakan salah satu Kelurahan dibawah wilayah administrasi Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Luas wilayah kelurahan ini dengan total keseluruhan 815,212 ha/m² yang didominasi oleh pemukiman masyarakat. Kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan yang tidak memiliki lahan pertanian. Sehingga Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo memilih kelurahan tersebut sebagai sasaran implementasi program *urban farming*. Kepala dinas bukan tanpa sebab memilih kelurahan Lemahputro sebagai target implementasi program *urban farming*, salah satu alasannya yaitu karena kelurahan tersebut tidak memiliki lahan pertanian.

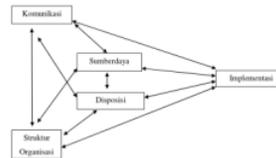
Pelaksanaan program ini berfokus dilokasi Perumahan Taman Pinang Indah Blok F, yang masuk dalam wilayah kelurahan Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Alasan pemerintah setempat memilih lokasi tersebut dikarenakan wilayah perumahan tidak memiliki lahan terbuka untuk bercocok tanam yang menjadi sasaran dari program *urban farming*. Pelaksanaan program *urban farming* di Perumahan Taman Pinang Indah ini diawali dengan inisiatif masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pasung agar lebih bersih, rapi, indah dan lebih produktif.

faktor faktor yang mempengaruhi implementasi dalam Program Urban Farming sebagai berikut :

Menurut Devyana (2020) Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, yang mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan (Devyana, 2020). Sementara menurut Tachjan dalam Siregar (2021) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik

sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu (Siregar *et al.*, 2021).

Edward III menyatakan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, uraian tersebut disajikan dalam gambar berikut:



Sumber : Data diolah Peneliti

1 Adanya struktur yang jelas maka akan secara otomatis membantu instansi atau organisasi untuk melakukan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing petugas, serta ada garis komando yang jelas di dalamnya (Wahono 2022). Komunikasi merupakan komponen utama dalam keberlangsungan proses implementasi kebijakan, hal tersebut menurut Watimena (2020) dikarenakan komunikasi merupakan akses petugas dalam menyampaikan informasi maupun spesifikasi kebijakan yang akan diimplementasikan. Sumber daya merupakan hal yang cukup mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi. Hal ini dikarenakan sebuah kebijakan akan terwujud apabila sumber daya manusia dan sumber daya finansialnya mendukung (Watimena, 2020). Disposisi merupakan sikap pelaksana, dimana setiap proses implementasi kebijakan respon dan sikap pelaksana sangat menentukan dalam penyampaian program sehingga mempengaruhi keberhasilan akan terwujudnya kebijakan tersebut. Menurut Auliana (2021) Struktur Birokrasi, struktur birokrasi dibagi menjadi dua yaitu *Standar Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. SOP berfungsi sebagai untuk melaksanakan kegiatan sesuai standar yang telah ditentukan sedangkan fragmentasi memiliki fungsi sebagai penyaluran tanggung jawab pelaksana terhadap tugas yang telah diberikan yang jelas dan sesuai akan otomatis membantu instansi atau organisasi untuk melakukan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing petugas, serta berfungsi sebagai pengatur yang jelas didalamnya (Diana and Aulina, 2021). Lebih jelasnya peneliti menyajikan data berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti dibawah ini:

Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor utama dan paling penting dalam proses implementasi kebijakan terutama dalam proses koordinasi dan sosialisasi. Menurut Edward III dalam (Joko widodo, 2010), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu transmisi,

kejelasan, dan konsistensi. Ketiga hal tersebut sangat mempengaruhi proses berjalannya suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pola komunikasi antara petugas Dinas Pangan dan Pertanian bidang kelompok jabatan fungsional bagian koordinator lapangan selaku pelaksana program sudah terlihat sangat bagus, hal tersebut dibuktikan dengan kejelasan pembagian tugas masing-masing individu dan sudah berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Sebagai contoh komunikasi yang diamati oleh peneliti dapat dilihat melalui pelaksanaan dilapangan oleh Petugas Dinas kepada masyarakat di lingkungan Kelurahan Lemahputro. *Pertama*, Pihak dinas pangan dan Pertanian mencoba membangun komunikasi dengan menemui masyarakat secara langsung, kemudian berkoordinasi membahas seputar pemanfaatan lahan pasung untuk dijadikan lahan urban farming yang ada di wilayah tersebut. *Piha*. *Kedua*, Pihak Dinas Pangan dan Pertanian memberi penyuluhan berupa edukasi terkait kegiatan urban farming yang akan dilaksanakan, lalu Pihak Dinas juga memberi bantuan berupa instalasi hidroponik sebagai langkah awal memulai program urban farming. *Ketiga*, pelaksanaan pengolahan lahan pasung dilakukan oleh Pihak Dinas beserta masyarakat sekitar, tanaman yang ditanam pada area lahan pasung adalah berupa bibit sawi dan bibit cabai. Pelaksanaan penanaman dilakukan, selama 3 (tiga) hari. *Keempat*, setelah dilakukan penanaman, berikutnya dalam satu minggu sekali selama program P2L berjalan, Pihak Dinas melalui personil pada bagian program P2L melakukan kegiatan survei lapangan dalam rangka *controlling* agar bisa mengetahui kendala apa saja yang ditemui saat program tersebut berjalan, kemudian satu bulan sekali dilakukan pertemuan antara pelaksana kegiatan dari pihak dinas dengan kelompok masyarakat untuk melakukan evaluasi serta disukusi seputar inovasi hasil dari program urban farming.

Sedangkan komunikasi yang terjalin antara penanggungjawab kelompok tani *Fastaman Green* dengan anggotanya juga terjalin sangat baik hal tersebut dibuktikan dengan hasil kutipan wawancara dengan Didi Tomang selaku penanggung jawab atau ketua kelompok tani *Fastaman Green*

“Disini kita menggunakan komunikasi efektif, dimana komunikasi efektif ini memiliki banyak peran dan manfaat untuk meningkatkan produktivitas, mengatasi masalah, dan membentuk suasana kerja yang nyaman untuk semua orang. Selain itu kita juga melakukan weekly meeting untuk evaluasi hasil yang dicapai tiap minggu, namun tiap dua atau tiga hari sekali kita sering nongkrong bareng anggota dipendopo ini untuk berbicara seputar progress dan inovasi tanaman apa yang bagus untuk dibudidayakan melalui urban farming ini.” Ujar Didi Tonang selaku penanggung jawab atau ketua kelompok tani *Fastaman Green*.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting kedua dalam implementasi kebijakan, menurut Meutia (2020) dalam hal ini yang dimaksud sumberdaya yakni objek pendukung atau pelaksana dari implementasi kebijakan yang juga dapat berupa sumber daya manusia maupun sumber daya finansial (Rendito, Hermawan and Meutia, 2020). Bagaimanapun baiknya kebijakan jika dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka akan mengalami kegagalan dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Bahkan menurut Dewi (2020) tanpa sumber daya yang memadai suatu implementasi kebijakan akan mustahil terealisasi (Dewi, 2020). Hal tersebut diperkuat oleh Putra (2022) bahwa

menurutnya sumberdaya akan menjadikan tatakelola program menjadi baik serta tercapai yang menjadi tujuan (Putra and Gea, 2022).

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana yang meliputi kemampuan sumber daya, komitmen, otoritas, dan koordinasi antar pelaksana (Syahrudin, 2020). Hal ini sejalan dengan pandangan Grindle, Mazmanian, dalam Harahap (2020) yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari pelaksananya (Harahap, 2020). Ditambahkan oleh Sakti (2022) bagaimana sumberdaya menjadi sebuah modal awal yang akan menentukan kesuksesan sebuah program yang akan dilaksanakan (Sakti and Hamid, 2022).

Dalam proses implementasi kebijakan sumberdaya menjadi komponen penting karena sangat berpengaruh terhadap terlaksananya kebijakan program tersebut. Jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan, maka proses implementasi tidak akan berhasil (Tiktawati et al. 2021). Maka dari itu menurut Surijadi (2020) sumberdaya tidak hanya sebagai kundi namun juga menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan (Surijadi and Musa, 2020).

Berikutnya, Sumberdaya manusia yang tercatat dalam status pegawai aktif Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah 104 orang yang mayoritas bergelar sarjana pertanian. Sedangkan pegawai aktif bidang kelompok jabatan fungsional berjumlah 45 orang masing masing ahli dalam bidangnya.

Data Peserta Penanaman Lahan Pasung Kel. Lemahputro		
No.	Asal	Jumlah
1.	Dinas Pangan dan Pertanian	5 Orang
2.	Kelompok Tani <i>Fastman Green</i>	8 Orang
3.	Masyarakat Kel. Lemahputro	8 Orang
4.	Pemerintah Kel. Lemahputro	2 Orang

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan sumber daya manusia dalam implementasi program *urban farming* di Perumahan Taman Pinang Indah melibatkan banyak pihak diantaranya Dinas Pangan dan Pertanian, Pemerintah Kelurahan Lemahputro, Kelompok Tani *Fastaman Green* dan Masyarakat Perumahan Taman Pinang Indah yang berkontribusi. Jumlah total sumber daya manusia dari berbagai unsur tersebut hadir pada saat pembukaan dan penanaman bibit selama 3 (tiga) hari proses penanaman, jumlah total keseluruhan pihak yang terlibat sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang. Selain itu, selama proses pengurusan tanaman tersebut ditempatkan 1 (satu) orang Petani anggota Kelompok Tani *Fastaman Green*. Dari Pihak Dinas Pangan dan Pertanian selaku otoritas formal tingkat Kabupaten, melibatkan dua bidang yakni bidang ketahanan pangan dan tenaga penyuluh pertanian lapangan yang membantu dalam mengawasi proses jalannya implementasi program *urban farming*.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, keterlibatan 23 (dua puluh tiga) orang dalam pelaksanaan penanaman tersebut cukup efektif dilaksanakan pada lahan seluas 5m² x 30m², sehingga tidak dapat kendala pada komposisi personil pada saat penanaman dilakukan. Hal ini sesuai dengan penuturan oleh Ibu Ratna D.L selaku Koordinator Lapangan:

“Tanah Pasung yang dimanfaatkan untuk program P2L ukurannya tidak terlalu luas, luasnya hanya pada sekitar 150m² sehingga ketika keseluruhan personil yang ada

bahu-mambahu ikut bekerja tidak sampai terjadi defisit pekerja” ujar Ibu Ratna D.L (Hasil Wawancara, pada 08 Mei 2022)

Sedangkan dari sumber daya finansial secara keseluruhan dari alokasi CSR perusahaan dari salah satu masyarakat serta dana swadaya dari Kelompok Tani Fastaman Green dan dibantu program kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo yang anggarannya termasuk kedalam APBD sebagai penunjang dalam proses pengimplementasiannya. Jumlah dana secara keseluruhan yang dikeluarkan guna menjalankan program tersebut berjumlah kurang lebih Rp 900.000.000. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian sebagai penunjang berjalannya program *urban farming* sudah sesuai dengan apa yang diperlukan masyarakat berupa tempat tanam, bibit sayur, netpot, dan rockwool.

Disposisi (sikap Pelaksana)

Disposisi atau sikap pelaksana diartikan sebagai kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan. Adapun yang menjadi unsur dalam motivasi tersebut adalah adanya pemahaman dan pengetahuan, adanya arah respon dari pelaksana terhadap implementasi kebijakan, dan intensitas dari respon itu sendiri. Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Umumnya para pelaksana menggunakan otoritasnya tergantung dari disposisi mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka, bahkan menurut (Gunawan, 2022) hal tersebut akan dapat mencegah berbagai perilaku negatif.

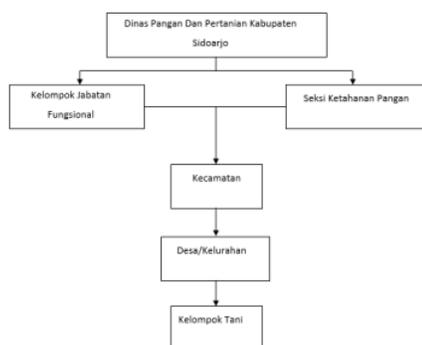
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan disposisi pelaksana dalam proses implementasi kebijakan *urban farming* di Perumahan Taman Pinang Indah secara keseluruhan sudah sangat baik, hal tersebut dilihat dari sikap pegawai saat melakukan penyuluhan dan menjalankan tugas dilapangan mampu menarik antusiasme serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya masalah pangan yang mampu membangun kontribusi masyarakat terhadap pentingnya tujuan dari program *urban farming* ini. Keterbukaan pelaksana kegiatan (*Fastaman Green*) terhadap masyarakat untuk membuka komunikasi serta adanya pertemuan rutin tiap minggu sebagai wadah untuk menampung pendapat, evaluasi mingguan dan penyampaian informasi terkait kendala dalam proses berjalannya program *urban farming*. Menurut pemaparan diatas menunjukkan bahwa sikap pelaksana dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses implementasi dilapangan sudah baik dan bisa diterima baik oleh masyarakat sehingga proses implementasi berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.

Pada saat dilaksanakan eksekusi lahan pasung di Kel. Lemahputro sejumlah 5 (Lima) orang, berdasarkan pengamatan keseluruhan pegawai Dinas tersebut dengan telaten melakukan edukasi ulang kepada Kelompok Tani Fastaman Green dan Masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan 15 menit sebelum pelaksanaan penanaman dimulai. Berikutnya, Pihak Dinas Pangan dan Pertanian juga turut serta melebur dan terjun secara langsung ditengah-tengah masyarakat dan turut serta membantu penanaman bibit yang sedang dilaksanakan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan komponen penting terakhir dalam proses implementasi kebijakan, Menurut Edward dalam (Dolonseda and Watung, 2020) terdapat dua karakteristik utama dalam birokrasi yaitu prosedur kerja buku standar atau *operating procedure* (SOP) dan fragmentasi. Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka memiliki hak untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Struktur organisasi merupakan faktor terakhir yang sangat mempengaruhi proses jalannya implementasi program *urban farming* tersebut. Tanpa adanya struktur organisasi maka pelaksana tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik, sehingga proses implementasinya tidak akan berhasil atau gagal (Makatita, 2020).

Bagan 1 Struktur Program Urban Farming Bidang Pertanian



Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, bidang ketahanan pangan

Struktur birokrasi dalam rangka implementasi program P2L dimulai dari Dinas Pangan dan Pertanian, kemudian turun kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Sie. Ketahanan Pangan, lalu turun lagi dengan adanya koordinasi kepada Kecamatan yang terdapat Lahan Pasung, berikutnya Koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, dan terakhir dilakukan penyuluhan kepada Kelompok Tani yang ada di wilayah tersebut.

Proses, pelaksanaan eksekusi lahan setelah ditetapkan melalui RKPD dan APBD. Berdasarkan penelitian, proses dari Dinas Pangan dan Pertanian hingga eksekusi lahan memakan waktu kurang lebih 2 (dua) minggu. Hal ini dapat dianggap efisien sebab tidak memerlukan waktu hingga berbulan-bulan, ketika Dinas Pangan dan Pertanian telah menerima ketetapan dari penngesahan RKPD.

Tabel 3
Data kepegawaian dinas pangan dan pertanian kab sidoarjo

No	Jabatan	Jumlah
1	PNS	132
2	P3k	46
3	Non ASN	94
	Jumlah	272

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo

Bagan 2
Struktur Organisasi Kelompok Tani Fastaman Green
Perumahan Taman Pinang Indah Kecamatan Sidoarjo , Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Kelompok Tani Fastaman Green

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa masing masing orang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Tugas Yoni pk dan wahyu menjabat menjadi penasehat sebagai berikut
 - Sebagai menjaga dan memastikan pelaksanaan kerja organisasi, memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap pelaksanaan maupun pengambilan keputusan, memberikan bimbingan yang dianggap perlu untuk mendukung atas pengelolaan dan pelaksanaan organisasi, dan memberikan arahan pada kebijakan, memberikan nasehat, masukan ataupun pertimbangan dalam suatu ide kerja.
2. Tugas Didi Tomang menjabat menjadi direktur sebagai berikut
 - Mengelola dan menyusun strategi untuk kemajuan organisasi
 - Melakukan evaluasi kinerja
 - Melakukan pengadaaan rapat
 - Menerapkan visi misi organisasi
3. Tugas M. Sopian Chudori menjabat menjadi sekretaris sebagai berikut
 - Membantu direktur dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan
 - Monitoring kinerja organisasi
 - Perencanaan serta evaluasi laporan
4. Tugas Sutopo Semmy menjabat menjadi bendahara sebagai berikut
 - Menyusun rencana anggaran
 - Melaksanakan pengelolaan keuangan
 - Menyusun laporan dan pembukuan
 - Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program
5. Tugas Marzuki Zulkifli, Priadi Darmaputa, dan semua pengurus menjabat menjadi Divisi Pemasaran sebagai berikut
 - Merespons kebutuhan pangan
 - Mengelola pemasaran
 - Mengembangkan strategi bisnis
6. Tugas Slamet Basuki, Budi Setyok, dan Aldi Putra menjabat menjadi divisi produksi sebagai berikut
 - Bertanggung jawab dan mengawasi proses produksi

- Menjaga dan mengawasi mutu produk agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7. Tugas Budi Siswanto, Moch. Azis menjabat menjadi divisi sarana dan prasarana sebagai berikut
- Merumuskan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan teknis dan penyusunan rencana makro pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pada saat implementasi *urban farming* di perumahan Taman Pinang Indah petugas lapangan Dinas Pangan dan Pertanian serta anggota kelompok tani Fastaman Green selaku pelaksana sudah menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan prosedur perencanaan yang telah ditetapkan, begitu juga mereka sudah membagi tugas dan menyebar tanggung jawab kepada petugas dari pemerintahan desa dalam pelaksanaan program. Pembagian tugas serta penyebaran tanggung jawab tersebut bertujuan agar adanya kejelasan dalam mencakup pembagian tugas masing masing pelaksana agar tidak terjadi saling tumpang tindih antar anggota pelaksana satu dengan anggota pelaksana lainnya dalam proses pelaksanaan kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas. Maka dapat di ambil kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan mengenai urban farming di perumahan taman pinang kelurahan lemahputro Kabupaten Sidoarjo ini sudah berhasil dari data yang sudah di terkumpul dan juga beberapa faktor yang melatarbelakangi kebijakan ini yakni mengatasi masalah alih fungsi lahan, ketahanan pangan, kualitas hidup, dan ekonomi masyarakat di wilayah padat penduduk. Hal ini terbukti dari pengakuan salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa banyak sekali manfaat yang diperoleh dari program urban farming ini, mulai dari ketersediaan pangan secara mandiri, peningkatan kualitas hidup, dan terbantunya finansial mereka. Namun perlu adanya sedikit koreksi seperti perlu adanya peningkatan kegiatan penyuluhan program urban farming ini agar banyak masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Hal ini dapat di ketahui dari :

- a. Komunikasi yang dilakukan antara petugas Dinas Pangan dan Pertanian bagian koordinator lapangan selaku pelaksana kegiatan sudah terlihat sangat bagus, hal tersebut dibuktikan dengan kejelasan pembagian tugas masing masing individu dan sudah berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Sarana Pelayanan, sarana yang telah di berikan sudah sangat di manfaatkan bagi warga kecamatan Jabon khususnya pelaku usaha, hal ini di buktikan dari banyaknya warga yang antusias datang karena proses pelayanan yang di berikan juga sangat baik, sehingga warga mampu betah melakukan prosedur pembuatan surat izin usaha sampai selesai.
- b. Sumber daya, sumber daya manusia dalam implementasi program *urban farming* di Perumahan Taman Pinang Indah melibatkan banyak pihak diantaranya Dinas pangan dan pertanian, pemerintahan Kelurahan Lemahputro, Kelompok Tani Fastaman Green dan masyarakat perumahan Taman Pinang Indah yang berkontribusi.
- c. Disposisi, proses implementasi kebijakan *urban farming* di Perumahan Taman Pinang Indah secara keseluruhan sudah sangat baik, hal tersebut dilihat dari segi antusiasme serta kontribusi masyarakat terhadap pentingnya tujuan dari program *urban farming* ini. Keterbukaan pelaksana terhadap masyarakat untuk membuka komunikasi serta adanya pertemuan rutin tiap minggu sebagai wadah untuk menampung pendapat, evaluasi mingguan dan penyampaian informasi terkait kendala dalam proses berjalannya program *urban farming*.

- d. Struktur Birokrasi, implementasi *urban farming* di perumahan Taman Pinang Indah petugas lapangan Dinas Pangan dan Pertanian serta anggota kelompok tani Fastaman Green selaku pelaksana sudah menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan prosedur perencanaan yang telah ditetapkan, begitu juga mereka sudah membagi tugas dan menyebar tanggung jawab kepada petugas dari pemerintahan desa dalam pelaksanaan program.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis berterima kasih kepada Civitas Akademisi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Kelurahan Lemahputro, Kabupaten Sidoarjo atas dukungan yang telah di berikan sehingga artikel ini dapat di publish.

REFERENSI

- . I. *et al.* (2021) 'PENGARUH KEPEMIMPINAN, KEMATANGAN PEGAWAI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA', *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik)*. Universitas Islam Sumatera Utara, pp. 149–158. doi:10.30743/jekkp.v2i2.3390.
- Adiyono, S. and Novianto, S. (2022) 'Prediksi Komoditas Pangan Pada Masa Pandemi Dengan Metode Forecasting dan Moving Average', *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*. Universitas Andalas, pp. 155–163. doi:10.25077/teknosi.v7i3.2021.155-163.
- Ahmad, D.N. and Setyowati, L. (2021) 'Mengenalkan Urban Farming pada Mahasiswa Untuk Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19 dan Menambah Nilai Ekonomi'.
- Austin, T. (2021) *IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM: URBAN FARMING MELALUI HIDROPONIK DAN BUDIKDAMBER DI KELURAHAN SIALANG PALEMBANG, J. A. I : Jurnal Abdimas Indonesia*.
- Belinda, N. *et al.* (2017) 'Pengembangan Urban Farming Berdasarkan Preferensi Masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya', 6(2).
- Candrawati, E. *et al.* (2019) 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS TEMUAN SORGUM SEBAGAI BAHAN PANGAN ALTERNATIF PENGGANTI BERAS', *PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN*. Universitas Trisakti, p. 2. doi: 10.25105/semnas.v0i0.5898.
- Devyana, N.S. (2020) 'PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus : Desa Ngroto , Kecamatan Pujon , Kabupaten Malang)', *Jurnal Ilmiah* [Preprint].
- Dewi, Y. (2020) 'PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN, DUKUNGAN ATASAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA', *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik)*. Universitas Islam Sumatera Utara, pp. 28–37. doi:10.30743/jekkp.v2i1.2731.
- Diana, B.A. and Aulina, R. (2021) 'Analisis Dampak Inovasi Layanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta (Service poin pelayanan perizinan Pasar Rebo)', *Jejaring Administrasi Publik*. Universitas Airlangga, pp. 18–34. doi:10.20473/jap.v13i1.29352.
- Dolonseda, H.P. and Watung, S.R. (2020) 'Dampak Lingkungan Kerja dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai', *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*. Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDikti) Wilayah XII, pp. 288–

297. doi:10.51135/publicpolicy.v1.i2.p288-297.
- Erna, S.P. (2018) *WUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL MELALUI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT SEBAGAI SUMBER ENERGI TERBARUKAN*. Center for Open Science. doi:10.31219/osf.io/48dxh.
- Gunawan, A. (2022) 'Peranan Good Corporate Governance Dalam Meminimalisir Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Go Publik', *Owner*. Politeknik Ganesha, pp. 379–385. doi:10.33395/owner.v6i1.618.
- Harahap, Y.R. (2020) 'PENGARUH MANAJEMEN PERUBAHAN, BUDAYA ORGANISASI DAN KUALITAS KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN CABANG PADANG SIDEMPUAN', *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik)*. Universitas Islam Sumatera Utara, pp. 9–16. doi:10.30743/jekkp.v2i1.2729.
- Ilvira Ginting, & H. (2019) 'PRODIKMAS Peningkatan Pengetahuan Konsep Urban Farming Pada Siswa SMA Negeri 1 Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang', 4(1), pp. 73–81.
- Joko widodo (2010) 'Analisis Kebijakan Publik'.
- Lasminingrat, L. and Efriza, E. (2020) 'PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN NASIONAL: STRATEGI ANTISIPASI KRISIS PANGAN INDONESIA', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. Indonesia Defense University, p. 243. doi:10.33172/jpbh.v10i3.1053.
- Makatita, M. (2020) 'Kontribusi Dampak Disiplin Kerja dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai', *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*. Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDikti) Wilayah XII, pp. 47–60. doi:10.51135/publicpolicy.v1.i1.p47-60.
- Publik, J.G.J.K.& M. and WAHONO, A. (2022) 'APLIKASI KONSEP MANAGING FOR RESULTS', *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*. Universitas Wijaya Putra, pp. 171–178. doi:10.38156/governancejkmp.v1i2.29.
- Putra, R.R. and Gea, O.O. (2022) 'Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi', 6, pp. 2517–2525.
- Rendito, R., Hermawan, D. and Meutia, I.F. (2020) 'Analisis Good Corporate Governance dalam Transformasi Digitalisasi Perbankan (Studi Pada Aplikasi Pelayanan "Pemda Online" Bank Pembangunan Daerah Lampung)', *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung, pp. 147–159. doi:10.23960/administrativa.v2i2.29.
- Sadali, M.I. (2018) 'Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo', *JURNAL GEOGRAFI*. State University of Medan, p. 86. doi:10.24114/jg.v10i1.8493.
- Sakti, F.R. and Hamid, R.S. (2022) 'Pengaruh Pengendalian Internal Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud)', 6, pp. 2759–2766.
- Simanjuntak, A.H. and Erwinsyah, R.G. (2020) 'KESEJAHTERAAN PETANI DAN KETAHANAN PANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19: TELAAH KRITIS TERHADAP RENCANA MEGAPROYEK LUMBUNG PANGAN NASIONAL INDONESIA', *Sosio Informa*. Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI. doi:10.33007/inf.v6i2.2332.
- Siregar, W.H. *et al.* (2021) 'PENGARUH HUMAN RELATION, DISIPLIN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL', *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik)*.

Universitas Islam Sumatera Utara, pp. 207–218. doi:10.30743/jekkp.v2i2.3396.

Sugiyono, P.D. (2016) *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, cv.

Surijadi, H. and Musa, M.N.D. (2020) 'Dampak Beban Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai', *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*. Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDikti) Wilayah XII, pp. 101–114. doi:10.51135/publicpolicy.v1.i2.p101-114.

Syahrudin, D. (2020) 'PENGARUH KOMITMEN, PERILAKU PEGAWAI, KEMAMPUAN KERJA DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I', *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik)*. Universitas Islam Sumatera Utara, pp. 71–78. doi:10.30743/jekkp.v2i1.2736.

Watimena, M.A. (2020) 'Implementasi Good Corporate Governance, Good Governance dan Kepemimpinan Situasional Terhadap Kinerja Pegawai', *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*. Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDikti) Wilayah XII, pp. 195–214. doi:10.51135/publicpolicy.v1.i2.p195-214.



Jurnal Fatihin

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.unair.ac.id

Internet Source

7%

2

repository.upnjatim.ac.id

Internet Source

3%

3

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On